

SOAL

1. PT. A melakukan perubahan sistem akuntansi yang menyebabkan laporan keuangan belum selesai sampai batas akhir melaporkan SPT. Jelaskan langkah yang harus dilakukan oleh PT. A dan apakah ada denda akibat dari kejadian tersebut?
2. PT. ABC mengalami kesulitan untuk membayar pajak karena masalah cash flow. Jelaskan langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk memecahkan masalah tersebut?
3. PT. Intan exportir yang setiap tahun selalu terjadi kelebihan pembayaran PPN. Karenanya setiap tahun perusahaan mengajukan restitusi. Karena proses restitusi yang lama, perusahaan mengalami kesulitan cash flow sehingga harus meminjam ke bank. Hal apakah yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempercepat proses restitusi?
4. PT. Melati telah menyerahkan SPT 2016, namun pada saat menyusun LK 2017 auditor perusahaan menemukan ada kesalahan atas laporan keuangan 2016 yaitu aset tetap belum didepresiasi menurut pajak dan akuntansi. Dampak kesalahan tersebut LK 2016 harus disajikan kembali, yang berakibat laba 2016 menjadi lebih besar. Apa yang harus dilakukan perusahaan terkait dengan hal ini dari sisi perpajakan.
5. PT. Melati 1 Oktober 2017 menerima SKP atas SPT tahun 2016 dengan KB sebesar 300milyar. Atas SKP tersebut perusahaan hanya menerima KB 100milyar sedangkan sisanya 200m mengajukan keberatan. Keputusan keberatan menyatakan perusahaan ditolak seluruhnya. PT. Melati mengajukan banding, dan keputusan banding memenangkan PT. Melati sebagian yaitu 50m dan tetap harus membayar 150m. Jelaskan kapan keberatan, keputusan keberatan diberikan dan banding paling lambat diajukan. Jelaskan konsekuensi denda dari kegiatan tersebut?
6. Apakah akuntan dan pegawai DJP dapat dikenakan sanksi pidana terkait dengan perpajakan? Analisis apakah kebijakan tersebut tepat.
7. Jelaskan denda pajak atas entitas yang tidak melakukan pembukuan atau melakukan pembukuan namun datanya tidak benar! Mengapa sanksi pajak dibedakan atas pajak yang dipotong dan pajak yang dibayar sendiri?
8. PT. Hafa setiap tahun selalu dalam posisi lebih bayar atas pembayaran PPN karena Entitas banyak melakukan penyerahan pajak kepada Wajib Pungut. Proses pemeriksaan yang lama membuat arus kas terganggu. Jelaskan apakah yang sebaiknya dilakukan oleh entitas agar dapat memperoleh kelebihan pembayaran pajak lebih cepat?
9. Amir seorang pengusaha, namun sampai saat ini belum memiliki NPWP dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Amir menjadi tokoh publik sehingga ada kemungkinan ditetapkan memiliki NPWP secara jabatan. Jelaskan perbedaan konsekuensi

jika Amir mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan jika NPWP-nya ditetapkan secara jabatan!

10. Jelaskan perbedaan antara penyidikan dan pemeriksaan, dan jelaskan juga perbedaan konsekuensi yang harus ditanggung WP atas dua hal tersebut!
11. Jelaskan perbedaan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak! Jelaskan perbedaan perhitungan denda atas SKPKB PPh Badan dan STP atas keterlambatan pembayaran angsuran pajak!
12. Jelaskan perbedaan pembukuan dan pencatatan! Jelaskan mengapa pencatatan masih diperkenankan dalam ketentuan UU perpajakan dan apa kriteria wajib pajak yang boleh melakukan pencatatan?
13. PT. Meyda belum menyelesaikan laporan keuangan perusahaan tahun 2015 sampai dengan bulan April 2016, karena perubahan sistem akuntansi di Perusahaan. Direncanakan sampai akhir April laporan keuangan tidak dapat diselesaikan. Jelaskan apa yang harus dilakukan perusahaan dan konsekuensi atas langkah yang dilakukan perusahaan tersebut.
14. Wajib pajak berhak untuk melakukan pembetulan SPT. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pembetulan? Jelaskan konsekuensi bagi perusahaan jika hasil pembetulan menyebabkan pajak yang telah dilaporkan lebih tinggi?
15. Jelaskan persyaratan apa yang harus dipenuhi ketika WP melakukan banding? Jelaskan pertimbangan WP dalam mengajukan banding jika dikaitkan dengan denda yang harus dibayar jika dalam banding tersebut kalah?

CONTOH KASUS

SOAL 1

Bapak Joshua Timothy merupakan seorang karyawan yang NPWP-nya terdaftar di KPP Gambir. Pada tanggal 31 Maret 2018, Bapak Joshua Timothy sedang melakukan pekerjaan dinas di Surabaya, padahal hari itu adalah batas terakhir untuk menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi untuk tahun pajak 2017. Bapak Joshua Timothy memiliki semua data perpajakan dalam *notebook* yang dibawanya.

Bapak Joshua Timothy merupakan staf pajak di PT Paul Michael sejak tahun 2015. Pada saat itu, PT Paul Michael juga sedang dalam proses menyiapkan SPT Tahunan Badan untuk tahun pajak 2017. PT Paul Michael diketahui telah memiliki konsultan pajak Perusahaan, yaitu Bapak Daniel Alkwartinanda.

Pertanyaan:

- a. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Bapak Joshua Timothy sehingga beliau dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat sebagai wajib pajak orang pribadi? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya! (6%)
- b. Apabila diasumsikan pajak kurang bayar Bapak Joshua Timothy adalah Rp 50 juta dan beliau baru melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tersebut pada bulan Agustus 2018, berapa besarnya sanksi pajak yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran **dan** pelaporan pajak Bapak Joshua Timothy? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya! (7%)
- c. Apabila diasumsikan PT Paul Michael mempunyai hutang pajak tahun 2017 sebesar Rp 300 miliar dan PT Paul Michael baru melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tersebut pada bulan September 2018, berapa besarnya sanksi pajak yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran **dan** pelaporan pajak PT Paul Michael? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya! (7%)
- d. Jika PT Paul Michael memberikan kuasa kepada Bapak Daniel Alkwartinanda, selaku konsultan pajaknya, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan PT Paul Michael, apakah Bapak Daniel Alkwartinanda mempunyai posisi yang sama dengan Pengurus/Direksi PT Paul Michael? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya! (5%)

SOAL 2

Chandra merupakan pegawai tetap di PT Bumi Sentosa, serta memiliki usaha berupa toko barang elektronik yang dirintisnya sejak bulan Juli 2010. Chandra telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP pada tahun 2013.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Chandra telah menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi untuk tahun pajak 2016 serta telah membayarkan pajak kurang bayarnya sebelum penyampaian SPT. Namun, setelah menyampaikan SPT, Chandra baru menyadari bahwa terdapat kesalahan dalam penghitungan pajaknya karena terdapat beberapa data penghasilan dan biaya yang belum dilaporkan ke dalam SPT-nya. PPh 29 yang telah disetorkan sebelum penyampaian SPT adalah Rp 550 juta, sedangkan nominal seharusnya adalah Rp 700 juta. Chandra kemudian menyampaikan SPT Pembetulan pada tanggal 16 September 2017.

Tim Pemeriksa Pajak mulai melakukan pemeriksaan atas SPT Tahunan 2016 Chandra pada bulan Oktober 2017. Setelah proses pemeriksaan selesai, Pemeriksa kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada tanggal 5 Desember 2017. Menurut Pemeriksa, seharusnya pajak kurang bayar yang dibayarkan Chandra sebelum menyampaikan SPT-nya adalah Rp 900 juta. Chandra memberikan tanggapan atas ketidaksetujuannya untuk nominal pajak sebesar Rp 200 juta. Namun, Pemeriksa tetap tidak setuju dan kemudian menerbitkan SKPKB pada tanggal 24 Desember 2017. Oleh karena itu, Chandra membayarkan kekurangan pajaknya sebesar Rp 200 juta pada 5 Februari 2018.

Pertanyaan:

- a. Apakah ada sanksi pajak yang akan dikenakan kepada Chandra karena Chandra menyampaikan SPT Pembetulan? Berikan penjelasan (dan perhitungan sanksi, jika ada) disertai dengan dasar hukumnya! (6%)
- b. Apabila seandainya Chandra baru dapat menyampaikan kesalahan dalam SPT-nya pada tanggal 3 November 2017, apakah ada sanksi pajak yang akan dikenakan kepada Chandra atas tindakan yang dilakukan Chandra tersebut? Berikan penjelasan (dan perhitungan sanksi, jika ada) disertai dengan dasar hukumnya! (6%)
- c. Berapa besarnya sanksi pajak yang dikenakan kepada Chandra terkait kekurangan pajak dalam SKPKB tersebut? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya! (6%)
- d. Kapan Chandra harus membayarkan kekurangan pajak dalam SKPKB tersebut? Apakah ada sanksi pajak yang dikenakan kepada Chandra terkait dengan pembayaran SKPKB yang dilakukan tanggal 5 Februari 2018 di atas? Berikan penjelasan (dan perhitungan sanksi, jika ada) disertai dengan dasar hukumnya! (7%)

SOAL 3

Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko bekerja sama mendirikan usaha fotokopi dan percetakan di Depok. Karena usaha mereka berkembang pesat, mereka memutuskan untuk mendirikan badan usaha bernama PT Lima Skuat ("PT LS") pada tahun 2010, dan menerbitkan saham dimana Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko masing-masing memiliki 20% saham PT LS.

Pada tahun 2015, PT Tajir tertarik **mengakuisisi 80% saham** Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko di PT LS dengan membayar kepada masing-masing pemegang saham perseorangan tersebut. Namun, Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko sadar bahwa masing-masing akan **terkena pajak penghasilan** dengan tarif maksimal 30% atas transaksi penjualan saham tersebut. Oleh karena itu, Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko kemudian berkonsultasi dengan Wawan, yang juga telah bersertifikasi konsultan pajak.

Wawan mengusulkan skema agar transaksi akuisisi itu dilakukan melalui **penerbitan saham baru** (saham kelas B) kepada PT Tajir dengan setoran modal tunai, sehingga PT Tajir memiliki 80% saham PT LS. Saham Adi, Budi, Cepi, Dina dan Eko diubah menjadi saham kelas A yang memiliki hak preferensial atas dividen. Wawan berargumentasi bahwa **tidak ada implikasi perpajakan** atas setoran modal tunai oleh PT Tajir tersebut.

Usulan Wawan disetujui oleh Adi, Budi, Cepi, Dina, Eko, serta PT Tajir. Sebagai kompensasi karena pengalihan kepemilikan PT LS, setoran modal tunai dari PT Tajir dibagikan kepada pemegang saham kelas A (Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko) sebagai dividen. Atas transaksi ini, PT LS memotong PPh atas dividen serta melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 (2) Final. Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko kemudian melaporkan penghasilan dividen dalam SPT mereka.

Pada saat pemeriksaan, Pemeriksa mengindikasikan adanya **potensi kerugian pendapatan negara** karena **karakterisasi akuisisi saham menjadi penerbitan saham baru**. Apabila tetap menjadi transaksi akuisisi saham, potensi penerimaan pajak sebesar Rp 14,985 miliar. Sementara itu, dengan skema penerbitan saham baru, pajak yang disetor ke kas negara hanya sebesar Rp 5 miliar (PPh atas dividen). Oleh karena itu, ada potensi kerugian pendapatan negara sebesar Rp 9,985 miliar.

Karena adanya potensi kerugian pendapatan ini, kemudian dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Untuk dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan, diperlukan informasi terkait perubahan susunan pemegang saham PT LS dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah mendapat informasi dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPB) terhadap PT LS pada Januari 2016.

Pertanyaan:

- a. Jelaskan dasar hukum yang digunakan oleh DJP agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan data dan informasi berkaitan dengan transaksi tersebut! (5%)
- b. Jelaskan dasar hukum yang digunakan oleh DJP untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan dalam kasus di atas! Apa yang dilakukan oleh DJP dalam pemeriksaan bukti permulaan? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya! (5%)
- c. Jika Pemeriksa Bukti Permulaan menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup adanya tindak pidana di bidang perpajakan dan dilanjutkan dengan penyidikan, ketentuan pidana apa (dan sanksi pidananya) yang akan dikenakan kepada PT LS? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya! (5%)
- d. Setelah Penyidik menyampaikan hasil penyidikan PT LS kepada penuntut umum, DJP menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPB) terhadap Adi, Budi, Cepi, Dina dan Eko. Menurut Anda, ketentuan pidana apa (dan sanksi pidananya) yang akan dikenakan kepada mereka? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya! (5%)
- e. Menurut Anda, apakah Wawan bisa juga dikenakan ketentuan pidana perpajakan karena menyarankan struktur transaksi tersebut? Apakah PT Tajir bisa juga dikenakan ketentuan pidana perpajakan karena PT Tajir menjadi lawan transaksi Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya! (5%)

SOAL 4

PT ADIDAYA PLASTIK (selanjutnya disebut “Perusahaan”) adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi *spare part* kendaraan dari bahan plastik. Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tanggal 10 Juni 2017, Kantor Pajak melakukan pemeriksaan lapangan di bidang perpajakan terhadap Perusahaan untuk tahun pajak 2015. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, Pemeriksa memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada Perusahaan pada tanggal 4 November 2017 dalam bentuk Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Dalam SPHP tersebut, Perusahaan dinyatakan Kurang Bayar PPh Badan sebesar Rp 800 juta, yang disebabkan oleh adanya perbedaan perlakuan atas biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan perpajakan.

Perusahaan menyampaikan tanggapan atas SPHP tersebut dan setelah pembahasan akhir, Perusahaan hanya menyetujui Kurang Bayar PPh Badan sebesar Rp 200 juta, sementara dari pihak Pemeriksa tetap pada keputusan awal dan menerbitkan SKPKB pada tanggal 20 November 2017. Karena tidak setuju dengan hal tersebut, Perusahaan mengajukan keberatan pada tanggal 15 Februari 2018. Adapun atas kekurangan pajak yang telah disepakati, Perusahaan telah membayarnya pada tanggal 12 Februari 2018, yaitu sebesar Rp 200 juta.

Fiskus kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Keberatan tanggal 2 Juni 2018 dan menyatakan bahwa keberatan Kurang Bayar PPh Badan diterima sebagian, sehingga Kurang Bayar PPh Badan menjadi Rp 500 juta. Karena masih belum puas dengan keputusan keberatan ini, Perusahaan memutuskan untuk mengajukan Banding. Pada tanggal 15 November 2018, Pengadilan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Banding dengan hasil sebagai berikut: “menerima sebagian banding yang diajukan sehingga Kurang Bayar PPh Badan menjadi Rp 300 juta”.

Pertanyaan:

- a. Kapan paling lambat Perusahaan dapat mengajukan keberatan? Apakah keputusan Perusahaan untuk hanya membayar Rp 200 juta sebelum mengajukan keberatan **dan** tidak membayar pajak terutang sebelum mengajukan banding dapat diperkenankan? Jika tidak diperkenankan, adakah sanksi yang dikenakan terkait hal tersebut? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya! (6%)
- b. Jika diasumsikan PT Adidaya Plastik menerima hasil keputusan keberatan, berapa pajak yang masih harus dibayar (termasuk sanksi pajak, jika ada) oleh Perusahaan? Kapan Perusahaan harus membayarnya? Berikan penjelasan (dan perhitungan) disertai dengan dasar hukumnya! (7%)
- c. Kapan paling lambat Perusahaan dapat mengajukan banding? Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi Perusahaan untuk pengajuan banding tersebut? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya! (5%)
- d. Berdasarkan hasil keputusan banding, berapa besarnya pajak yang masih harus dibayar (termasuk sanksi pajak, jika ada) oleh Perusahaan? Kapan Perusahaan harus membayarnya? Berikan penjelasan (dan perhitungan) disertai dengan dasar hukumnya! (7%)

SOAL 5

Aldo memiliki usaha percetakan, warung makan, dan rumah kost. Peredaran usaha perusahaan di atas 20 miliar setahun dari semua usaha yang dimiliki. Dari hasil usaha tersebut Aldo membeli beberapa properti untuk disewakan maupun dijual lagi. Aldo mendanai kegiatan usahanya dengan modal sendiri sehingga Aldo tidak merasa perlu untuk membuat pencatatan keuangan dan pembukuan. Pada tahun 2013, Pemda Depok menetapkan Aldo sebagai pengusaha restoran yang atas usahanya tersebut harus memungut pajak restoran. Karena tidak dapat menghindari dari kewajiban membayar pajak daerah dan kewajiban memiliki NPWP, mulai tahun 2013 Aldo memiliki NPWP dan mulai memenuhi kewajiban pajaknya.

Untuk memenuhi kewajiban pajak daerah, Aldo menyerahkan kepada konsultan pajak yang berafiliasi dengan petugas pajak Dispenda dan juga KPP. Pada tahun 2015, Aldo membayar jasa konsultan sebesar 10 juta dan pajak sebesar 30 juta. Aldo menyerahkan semua catatan penerimaan dan pengeluaran uang dari usahanya kepada konsultan pajak. Aldo memiliki lebih

dari 10 karyawan dan lima diantaranya diberikan gaji di atas PTKP, namun tidak pernah dilakukan pemotongan pajak. Untuk menarik pelanggan, Aldo memasang iklan di depan usahanya, namun karena ukurannya tidak terlalu besar, maka Aldo tidak membayar pajak atas pemasangan iklan tersebut.

Aldo tidak paham masalah perpajakan, namun pada saat diminta tanda tangan SPT pajak, sebenarnya Aldo tahu bahwa nilai penjualan yang dicantumkan dalam SPT tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan omset penjualan yang terjadi. Demikian juga kekayaan yang dicantumkan dalam SPT pajak juga tidak menunjukkan seluruh kekayaan yang dimiliki. Aldo merasa aman pajaknya tidak bermasalah karena tidak pernah diperiksa. Aldo juga yakin dengan kemampuan konsultan pajaknya.

Tahun 2016 Aldo mendengar tentang tax amnesty dan mendiskusikan dengan konsultan pajaknya apakah perlu melakukan tax amnesty. Kembali Aldo disarankan mengikuti tax amnesty dan konsultannya menyarankan untuk melaporkan sebagian satu property dan deposito yang dimiliki. Aldo membayar uang tebusan *tax amnesty* dengan menggunakan dasar nilai NJOP property yang dimiliki dan nilai deposito. Namun, sebenarnya masih ada sepuluh tanah dan bangunan yang belum dilaporkan dalam tax amnesty tersebut.

Diminta:

- a. Etiskah apa yang dilakukan Aldo menurut Anda? (3)
- b. Berikan pendapat Anda tentang pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Aldo dan berikan referensi pasal dan potensi sanksi yang harus diterima atas pelanggaran tersebut! (10)
- c. Apakah konsultan pajak yang menyelesaikan administrasi pajak Aldo dapat juga dikenakan sanksi? (2)
- d. Jelaskan pandangan Anda tentang regulasi *tax amnesty* dengan melihat kasus seperti Aldo? (2)
- e. Berikan saran apa yang seharusnya dilakukan oleh Aldo? (3)

SOAL 6

WP Badan PT. Anggrek Hitam menyelesaikan kewajiban pajak untuk tahun 2013 dengan membayar pajak pada 25 April 2014 dan melaporkan pajak pada 28 April 2014. SPT Pajaknya menyebutkan bahwa:

Penghasilan	100.000.000.000
Beban yang boleh dikurangkan	76.000.000.000
Penghasilan kena pajak	24.000.000.000
Pajak	<u>25%</u>
Pajak	6.000.000.000

PPh 25	<u>5.000.000.000</u>
PPh 29	1.000.000.000

PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2014 sebesar Rp 500.000.000 per bulan mulai dibayar bulan Mei 2014.

Perusahaan pada 22 September 2014 mulai diperiksa. Hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa beban yang boleh dikurangkan sebesar Rp 64.000.000.000, sedangkan untuk penghasilan dan kredit pajak jumlahnya sesuai SPT. WP tidak menyetujui temuan pemeriksa pajak tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dikeluarkan SKPKB pada tanggal 25 November 2014.

Diminta:

- Berapa nilai pajak dan denda yang ada dalam SKPKB pada tanggal 25 November 2014? (4)
- Kapan paling lambat perusahaan membayar pajak dalam SKPKB tersebut? Jelaskan bagaimana dampak pembayaran SKPKB terhadap pembayaran PPh 25 dan berapa denda pajak yang harus dibayar? (4)
- Jika perusahaan tidak membayar seluruh SKP tersebut dan mengajukan keberatan, kapan perusahaan paling lambat mengajukan keberatan dan apa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat mengajukan keberatan? (1)
- Misalnya perusahaan mengajukan keberatan pada tanggal 20 Januari 2015, kapan Surat Keputusan Keberatan paling lambat harus dikeluarkan oleh Kantor Pajak? (1)
- Surat Keputusan Keberatan dikeluarkan pada tanggal 25 September 2015 dan menyatakan bahwa jumlah beban yang boleh dikurangkan Rp 70.000.000.000. Perusahaan menerima keputusan keberatan tersebut. Berapa jumlah pajak dan denda yang harus dibayar berdasarkan keputusan keberatan tersebut? (5)
- Misal, perusahaan tidak menerima seluruhnya keberatan tersebut karena merasa yakin bahwa pendapatnya benar, kemudian mengajukan banding tanggal 5 Desember 2016. Hasil putusan banding dikeluarkan pada tanggal 6 September 2016 dan menyatakan bahwa beban yang boleh dikurangkan sebesar Rp 73.000.000.000. Hitunglah berapa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan beserta dendanya. (5)

SOAL 7

PT. Ina pada tahun 2014 mengimplementasikan sistem akuntansi baru di perusahaannya. Dampak dari perubahan sistem tersebut adalah perusahaan sampai dengan bulan April belum dapat menyelesaikan laporan keuangannya sehingga SPT pajak belum diselesaikan.

- Jelaskan apakah yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum akhir April 2015! (5)
- PT. Ina mengestimasi jumlah penghasilan kena pajak sebesar Rp 200miliar dan kredit pajak sebesar Rp 45miliar dan membayar pajak pada tanggal 29 April 2015. Berapa jumlah pajak yang harus dibayar? Berapa jumlah pajak yang akan diangsur pada bulan Mei 2015 jika

kredit pajak tersebut terdiri dari PPh 25 sebesar Rp 40miliar dan sisanya adalah pajak lainnya? (5)

- c. Persetujuan PT. Ina disetujui untuk menunda penyampaian SPT sampai dengan 30 Juni 2015. Perusahaan berhasil menyelesaikan laporan keuangannya dan pada tanggal 28 Juni melakukan pembayaran pajak dan tanggal 30 Juni menyampaikan SPT sesuai dengan perhitungan sebenarnya. Berdasarkan perhitungan sesungguhnya diketahui kredit pajak sama, namun penghasilan kena pajak sebesar Rp 220miliar. Jelaskan berapakah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan berapa sanksi yang harus dibayar? Bagaimana dampak penyampaian SPT ini terhadap PPh 25 bulan Juli dan apakah ada konsekuensi dendanya? (5)
- d. Apakah boleh PT. Ina membuat SPT atas data estimasi tersebut pada bulan April 2015 dan kemudian pada 30 Juni 2015 melakukan pembetulan SPT pada bulan Juni berdasarkan laporan keuangan yang telah selesai, tanpa pengajuan permohonan penundaan? Jelaskan apakah ada konsekuensi yang harus ditanggung atas langkah ini? (5)

SOAL 8

Amir memiliki usaha percetakan, warung makan, jual beli property, sewa rumah dan rumah kost. Peredaran usaha perusahaan di atas 50 miliar setahun dari semua usaha yang dimiliki. Amir mendanai kegiatan usahanya dengan modal sendiri sehingga Amir tidak merasa perlu untuk membuat pencatatan keuangan dan pembukuan. Pada tahun 2012, Pemda Tangerang Selatan menetapkan Amir sebagai wajib pajak daerah. Karena tidak dapat menghindar dari kewajiban membayar pajak daerah dan kewajiban memiliki NPWP, mulai tahun 2012 Amir memiliki NPWP dan mulai memenuhi kewajiban pajaknya.

Untuk memenuhi kewajiban pajak daerah, Amir menyerahkan kepada konsultan pajak yang berafiliasi dengan petugas pajak Dispenda dan juga KPP. Pada tahun 2015, Amir membayar jasa konsultan sebesar 20 juta dan pajak penghasilan sebesar 40 juta. Amir menyerahkan semua catatan penerimaan dan pengeluaran uang dari usahanya kepada konsultan pajak. Amir memiliki lebih dari 20 karyawan dan lima diantaranya diberikan gaji di atas PTKP, namun tidak pernah dilakukan pemotongan pajak. Untuk menarik pelanggan, Amir memasang board di depan usahanya baik warung makan, usaha cetak sewa kost, dengan ukuran besar. Amir tidak membayar pajak atas pemasangan iklan tersebut karena berdalih ditempatkan di depan tempat usahanya. Untuk pajak atas warung makan secara teratur dibayar namun hanya meliputi 20% dari total omset yang sebenarnya.

Amir kurang memahami masalah perpajakan, namun pada saat diminta tanda tangan SPT pajak, sebenarnya Amir tahu bahwa nilai penjualan yang dicantumkan dalam SPT tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan omset penjualan yang terjadi. Demikian juga kekayaan yang dicantumkan dalam SPT pajak juga tidak menunjukkan seluruh kekayaan yang dimiliki. Amir merasa aman pajaknya tidak bermasalah karena tidak pernah diperiksa. Amir juga yakin dengan kemampuan konsultan pajaknya. Pada tahun 2016 ini Amir disarankan oleh konsultan pajaknya

untuk melakukan *Tax Amnesty*? Kembali dalam melakukan tax amnesty Amir juga tidak melaporkan seluruh hartanya. Menurut konsultan pajak sebagai syarat supaya tidak diperiksa di kemudian hari.

Diminta:

- a. Identifikasikan kewajiban pajak Amir? (3)
- b. Berikan pendapat Anda tentang pelanggaran pajak dan tindakan tidak etis yang dilakukan oleh Amir dan berikan referensi pasal dan potensi sanksi yang harus diterima atas pelanggaran tersebut! (8)
- c. Apakah konsultan pajak yang menyelesaikan administrasi pajak Amir dapat juga dikenakan sanksi? (2)
- d. Berikan saran apa yang seharusnya dilakukan oleh Amir? (4)
- e. Berikan pandangan Anda atas *tax amnesty* yang dilakukan oleh WP yang memiliki perilaku seperti Amir? (3)

SOAL 9

WP Badan PT. Kenanga Ungu menyelesaikan kewajiban pajak untuk tahun 2014 dengan membayar pajak pada 28 April 2015 dan melaporkan pajak pada 30 April 2015. SPT Pajaknya menyebutkan bahwa:

Penghasilan	200.000.000.000
Beban yang boleh dikurangkan	<u>190.000.000.000</u>
Penghasilan kena pajak	10.000.000.000
Pajak	<u>25%</u>
Pajak	2.500.000.000
Kredit pajak (22 dan 23)	<u>3.700.000.000</u>
PPh 28 (lebih bayar)	1.200.000.000

Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut WP memilih meminta restitusi karena tidak memiliki kewajiban pajak. Perusahaan dalam kegiatan usahanya banyak dipotong pajaknya oleh pihak lain sehingga hampir selalu dalam posisi lebih bayar.

Untuk PPN perusahaan setiap bulan juga lebih sering lebih bayar pajak karena banyak melakukan penyerahan pajak kepada wajib pungut. Untuk bulan Mei 2015, PPN Keluaran sebesar 1 miliar dan PPN masukan sebesar 1.8miliar

Diminta:

- g. Apakah yang akan dilakukan fiskus atas kelebihan pembayaran pajak baik dalam SPT tahunan PPh Badan tahun 2014 dan SPT Masa PPN bulan Mei 2015 (5)

- h. Misalkan fiskus melakukan pemeriksaan PPh Badan tahun 2014 dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pada 2 September 2015, dinyatakan bahwa lebih bayar sebesar Rp 200.000.000. WP masih belum puas dengan SKPLB tersebut dan mengajukan keberatan pada tanggal 2 Nopember 2015 beserta alasan dan bukti pendukung lengkap. Surat Keputusan Keberatan dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2016 dan menyatakan bahwa lebih bayar perusahaan total sebesar Rp 600.000.000juta sehingga WP mendapat tambahan Rp 400 dari nilai dalam SKPLB.

Jelaskan kapan WP paling lambat menerima pembayaran pengembalian pajak dari SKPLB dan SK Keberatan. Jelaskan apakah terdapat kompensasi bunga yang diperoleh WP dari lebih bayar tersebut? (5)

- i. Jelaskan langkah apa yang paling tepat dilakukan WP jika bisnis perusahaan menyebabkan terjadinya pajak lebih bayar baik untuk PPh dan PPN? Jelaskan konsekuensi dan manfaat dari tindakan tersebut? (5)
- j. Misalnya langkah c dipenuhi dan ditempuh oleh perusahaan dan surat keputusan diterbitkan, WP menerima restitusi PPN sesuai yang dimohonkan sebesar Rp 800milyar. Fiskus melakukan pemeriksaan PPN atas masa pajak Mei 2015. Hasil pemeriksanaan menyatakan bahwa PPN masukan sebesar 1,6miliar dan PPN keluaran sebesar 1,2miliar. Jelaskan denda dan konsekuensi pajak yang harus ditanggung WP. Bagaimana Surat Ketetapan berdasarkan pemeriksaan tersebut? (5)

SOAL 10

PT. Kenanga menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 600milyar yang diterbitkan pada tanggal 1 September 2015 atas pajak tahun 2014. Atas SKPKB ini WP tidak mengajukan keberatan. Karena jumlahnya besar maka Perusahaan mengajukan surat permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak.

- a. Wajib Pajak disetujui sebelum akhir jatuh tempo SKP untuk melakukan angsuran pajak selama 5 bulan dengan jumlah tetap. Buatlah skedul angsuran dan denda yang harus dibayar setiap kali angsuran (5)
- b. Jelaskan apakah terdapat dampak penerbitan pajak tersebut atas pembayaran PPh 25 yang telah dilakukan perusahaan untuk tahun pajak 2015. Jika ada hitunglah berapa tambahan pembayaran PPh 25 dan denda yang harus dibayar? (5)
- c. Misalnya WP tidak mengajukan angusuran namun melakukan penundaan pembayaran pajak selama 5 bulan. Hitung berapa jumlah pajak dan denda yang harus dibayar oleh WP. Berikan saran kepada perusahaan mana yang sebaiknya dilakukan oleh entitas apakah sebaiknya menunda atau mengangsur pajak tersebut? (5)
- d. Jika WP tidak melakukan pembayaran atas SKPKB tersebut dan kemudian mengajukan keberatan. Jelaskan apakah konsekuensi pajak yang dibayar dan dendanya jika Surat Keputusan Keberatan baru dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2016 dan menyatakan bahwa keberatan diterima 50%?

